Reaktualisasi Pancasila sebagai Upaya Preventif Radikalisme di Indonesia

Abdul Gofur

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos-el: gofurabdul319@gmail.com

Abstrak

Globalisasi telah menjadi ancaman keutuhan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan terbuka lebarnya interaksi komunikasi dengan mudah. Aktivitas ini berpotensi menimbulkan intervensi yang mempengaruhi paham tertentu pada penerima informasi. Di era globalisasi ancaman tidak terbatas pada ancaman militer saja melainkan banyak ancaman non militer baik dari segi politik, ekonomi dan ideologi merupakan salah satu ancaman yang sangat berbahaya adalah penyebaran radikalisme. Bahaya radikalisme selain dapat mengganggu stabilitas keamanan sebuah bangsa juga menimbulkan keretakan persatuan di negara Indonesia. Paham radikalisme yang dimaksudkan yaitu radikalisme agama. Isu mengenai kepercayaan sangat rentan pada keutuhan NKRI. Perlu adanya respon cepat untuk menanggulangi radikalisme yang semakin marak akibat globalisasi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengakui kembali dan membiasakan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia. Mengakui adanya nilai Pancasila dan mengimplementasikannya disebut sebagai reaktualisasi Pancasila dengan membudayakan kembali nilai-nilai Pancasila. Tulisan ini memiliki tujuan untuk memperdalam dan menambah wawasan mengenai reaktualisasi Pancasila sebagai upaya preventif radikalisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah *library research* atau studi keputakaan dengan mendasarkan beberapa referensi yang terkait. Dengan demikian akan memperkaya mengenai konsep reaktualisasi Pancasila sebagai salah satu solusi ancaman radikalisme di Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, Globalisasi, Radikalisme, Reaktualisasi

Abstract

Globalization has become a threat to the wholeness and diversity of Indonesian society. The advancement of science and technology (IPTEK) resulted in wide open communication interaction easily. This activity has potential to generate interventions that affect certain understandings of the recipient of the information. In the era of globalization, the threat is not limited to military threats but rather many non-military threats both from the political, economic and ideological aspect that is one of the most dangerous threats is the spread of radicalism. In addition to disrupting the stability of a nation's equality, the danger of radicalism also creates a rift of unity in the country of Indonesia. The idea of radicalism is that of religious radicalism. The issue of belief is very vulnerable to the unity of the Unitary Republic of Indonesia. There needs to be a quick response to tackle the increasingly widespread radicalism caused by globalization. One solution that can be done is to re-acknowledge and familiarize it through the implementation of Pancasila values in the life of the people of the nation and state of Indonesia. Recognizing the value of Pancasila and implementing it is called Pancasila re-actualization by repopulating the values of Pancasila. This paper aims to deepen and add insight into the re-actualization of Pancasila as a preventive effort of radicalism in Indonesia. The method used in the writing of this scientific paper is the library research by basing some related references. It will enrich the concept of re-actualization of Pancasila as one of solution to the threat of radicalism in Indonesia.

Keywords: Pancasila, Globalization, Radicalism, Re-actualization

Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era globalisasi tentu memberikan dampak positif maupun negatif yang juga akan menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Globalisasi memberikan kemudahan dengan terbuka lebarnya interaksi antar masyarakat bangsa-bangsa di dunia, namun memberikan *effect* yang menimbulkan paradoksnya nilai-nilai yang berasal dari luar terhadap nilai-nilai pancasila. Negara Indonesia masuk dalam peta dunia yang tentu saja tidak dapat terhindarkan

dari dampak globalisasi yang terjadi saat ini. Masyarakat semakin mudah untuk mengakses berbagai macam informasi baik dari media masa cetak, elektronik, online maupun sosial media yang hampir seluruh masyarakat Indonesia terutama generasi muda dengan cepat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Meskipun internet belum digunakan di seluruh wilayah namun pengguna internet di Indonesia sebagaimana menurut data kementerian informasi dan informasi Republik Indonesia jumlahnya mencapai kurang lebih 82 juta dari 238 juta penduduk Indonesia. Aktivitas ini tidak dapat

dihindari dan sangat memungkinkan menimbulkan intervensi terhadap pola pikir dan ancaman dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Di era globalisasi ancaman sebuah bangsa tidak dapat lagi diterjemahkan pada ancaman militer semata, melainkan banyak ancaman yang bersifat non militer dibidang ideologi, politik, ekonomi sosial budaya yang sangat perlu diperhitungkan dan menuntut kepekaan dan kewaspadaan semua pihak. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat berfikir dan bersikap liberal. Nuansa kebebasan yang terjadi juga mendorong berkembangnya paham radikal dan penyimpangan terhadap keyakinan beragama maupun budaya asing yang menggusur budaya asli bangsa Indonesia. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan toleransi ditengah bangsa Indonesia yang majemuk telah ditinggalkan dan pada akhirnya masyarakat menjadi lebih individualis, kapitalis dan fanatis.

Paham radikalisme diterjemahkan sebagai sebuah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Madjid, 1995: 260). Dalam konteks radikalisme sering kali menasar pada umat Islam, namun pada hekekatnya Islam tidak mengajarkan kekerasan dalam menyebarkan agama Islam dan tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Namun fakta tersebut tidak bisa dibantah bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan atas nama sebuah kelompok.

Persoalan radikalisme tidak dapat hanya dipandang dari motif dan perspektif agama semata, namun berangkat dari persoalan ideologi, politik, dan ekonomi secara global. Ada dua hal yang bisa dibaca sebagai penyebab radikalisme. *Pertama*, warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim, karena ada modus-modus penindasan politik Islam terutama pada beberapa fragmen sejarah orde baru. *Kedua*, fenomena ekonomi-politik yang lebih dikenal dengan "pendekatan kelas". Artinya, respons radikalisme pada dasarnya adalah respons kelas untuk melawan hegemoni kapital yang oligarkis dengan negara (Umar, 2010: 172).

Lebih lanjut radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosio-politik dan sosio-historis. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok Islam secara historis lebih tepat dipandang sebagai gejala sosial politik gejala keagamaan meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan. Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam oleh pers barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya tidak jarang pandangan

negatif banyak dialamatkan kepada Islam sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat perlu dicurigai. Hal yang demikian terjadi karena masyarakat barat mampu menguasai pers yang dijadikan instrumen yang kuat guna memroyeksikan kultur dominan dari peradaban global (Ummah, 2012: 112).

Terlepas dari berbagai macam penyebab berkembangnya paham radikalisme tentu bangsa Indonesia memiliki Ideologi yang berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh *founding father* menjadi sebuah karya bangsa yang bernama Pancasila. Dengan berkembangnya zaman yang penuh tantangan tentu banyak mengalami ujian sehingga diperlukan sebuah solusi tentang bagaimana menginternalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang semakin mengglobal. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa dalam berbagai aktivitas masyarakat, berbangsa dan bernegara perlu mengembalikannya kembali cara pandang melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya, juga memberi inspirasi bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai ke daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan menempatkan Pancasila pada nilai dasar dalam berpikir dan bertindak, pada akhirnya akan membentuk suatu manusia yang Pancasila. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih mendalam mengenai reaktualisasi Pancasila sebagai upaya preventif radikalisme di Indonesia.

Metode

Metode penulisan ini menggunakan metode *library research*. Metode ini merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif. Riset pustaka ini membatasi hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan, tanpa memerlukan riset lapangan. Metode ini digunakan untuk menjawab studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat (Mustika Zed, 2004). Selanjutnya, menurut Mustika Zed (2004:54), menjelaskan bahwa riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Hal tersebut, didasarkan dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan. Beberapa jenis literatur utama yang digunakan terdiri atas, Sedangkan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research*, yaitu mengidentifikasi berbagai referensi yang terkait dengan judul karya tulis. Data atau informasi

tersebut, didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya disusun berdasarkan hasil studi, sehingga terkait satu sama lain dan sesuai dengan tema yang dibahas.

Analisis data dilakukan secara induktif, yang di dalamnya terdiri dari dua tahap yaitu proses reduksi data dan penyajian data. Reduksi data bertujuan untuk penulis lebih mudah dalam memilih data yang valid, sedangkan penyajian data agar dimungkinkan penarikan simpulan. Penyajian data yaitu pengumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan, maupun pengambilan suatu tindakan tertentu. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk teori dan argumentatif sehingga penulis dapat dengan menguasai dengan baik.

Penarikan simpulan didapatkan sesudah merujuk tujuan penulisan, analisis dan sintesis. Simpulan juga memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik merepresentasikan pokok-pokok bahasan dalam karya tulis serta didukung dengan saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Globalisasi yang dihadapi bangsa ini nampaknya membawa dampak yang serius terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, hal ini telah diramalkan oleh para cendekiawan dunia bahwa keberlangsungan negara dan eksistensi negara kebangsaan akan mendapat tantangan yang serius, sehingga jikalau segenap elemen kebangsaan tidak memberikan perhatian terhadap masalah tersebut, maka tidak menutup kemungkinan negara kebangsaan tersebut akan mengalami keruntuhan (Kaelan, 2015:26-27). Dengan terus berkembangnya globalisasi secara massif dan tidak terkecuali Indonesia maka akan merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. (Latif, 2011: 226). Dampak yang di timbulkan tentu kontradiktif dan memberikan peluang maupun dampak positif dan negatif terhadap bangsa Indonesia.

Berkembangnya ilmu pengetahuan, pendidikan, komunikasi yang berkembang pesat proses-proses seperti migrasi, urbanisasi makin meluas, termasuk hubungan hubungan timbal balik, saling pengaruh-mempengaruhi antara negara-negara dan bangsa-bangsa sehingga sering juga terdapat hal-hal intoleransi, ekstrimisme keagamaan dan etnis (Zarbaliyez, 2017: 12).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme berarti (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. (Suharso, 2016:400). Radikalisme juga dapat disebut sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering

menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995: 124). Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Tetapi memang tidak bisa dibantah bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham keagamaannya secara kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut kaum radikalisme Islam.

Radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, faham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang inkonstitusional, bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial (Munip, 2012: 162).

Dijelaskan juga oleh Irwan Masduqi (2013: 3-4) bahwa paham radikalisme memiliki ciri-ciri dan dapat dikenali dan dipahami sebagai bagian dari antisipasi doktrin-doktrin yang semakin meluas antara lain yaitu: 1) sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. 2) Radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya samah (ringan) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. 3) Kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. 4) Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. 5) Mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. 6) Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat.

Penyebaran paham radikalisme tentu perlu diwaspadai perkembangannya hal ini tidak terlepas dari propaganda yang dilakukan dengan cara terbuka maupun tertutup. Faham radikalisme Islam menggunakan berbagai sarana dan media untuk menyebarluaskan faham mereka, baik dalam rangka pengkaderan internal anggota maupun untuk kepentingan sosialisasi kepada masyarakat luas diantaranya yaitu,

1. Melalui pengkaderan organisasi. Pengkaderan organisasi adalah kegiatan pembinaan terhadap anggota dan atau calon anggota dari organisasi simpatisan atau pengusung radikalisme. Dengan pengkaderan internal biasanya dilakukan dalam bentuk training calon anggota baru dan pembinaan anggota lama.

2. Mentoring agama Islam, dilaksanakan di beberapa kampus Perguruan Tinggi Umum dan sekolah. Melalui masjid-masjid yang berhasil “dikuasai,
3. Melalui majalah, buletin, dan booklet. Penyebaran ideologi radikalisme juga dilakukan melalui majalah, buletin dan booklet. Salah satu buletin yang berisi ajakan untuk mengedepankan jihad dengan kekerasan adalah buletin “Dakwah & Jihad”.
4. Melalui penerbitan buku-buku. Faham radikalisme juga disebarkan melalui buku-buku, baik terjemahan dari bahasa Arab, yang umumnya ditulis oleh para penulis Timur Tengah, maupun tulisan mereka sendiri. (Munip, 2012: 165-166).

Lemahnya internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila tentu memberikan iklim yang kondusif bagi berkembangnya paham radikalisme-terorisme global. Nampaknya tantangan globalisasi semakin rumit, dengan melemahnya gerakan kiri berupa ideologi komunisme di dunia dewasa ini muncul sesuatu gerakan baru yang bersumber pada paham politik keagamaan seperti NII yang dahulu pernah berkembang, dewasa ini muncul dengan wajah berbeda, misalnya gerakan terorisme yang melakukan operasi melalui gerakan dengan jalan kekerasan dan teror, yang memiliki hubungan dengan gerakan-gerakan internasional seperti Al Qaeda. Bahkan akhir-akhir ini disinyalir diberbagai media masa pengaruh gerakan ISIS telah dirasakan di Indonesia. (Khalean, 2015: 31)

Hal dapat dibuktikan dengan data dari Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo yang dilakukan pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 mengungkapkan hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal. Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom. Selanjutnya survey juga dilakukan oleh Wahid Foundation bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sampel terdiri atas 1.520 responden dari 34 provinsi di Indonesia dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Dan hanya sebanyak 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal. Namun Yenny mengingatkan meski hanya sebesar 7,7 persen, persentase tersebut cukup mengkhawatirkan. Sebab persentase tersebut menjadi proyeksi dari 150 juta umat Islam Indonesia. Artinya jika diproyeksikan, terdapat sekitar 11 juta umat Islam Indonesia yang bersedia bertindak radikal.

Keadaan yang demikian menimbulkan kekawatiran bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munculnya gerakan radikalisme tentu tidak dapat disebabkan oleh term agama saja, namun dapat ditinjau dari latar belakang sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (2010: 172) dalam artikelnya yang berjudul “*Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia*” menjelaskan bahwa penyebab radikalisme dapat dibedakan menjadi dua yaitu, *pertama*, warisan sejarah umat Islam yang berkonflik dengan rezim, karena ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa fragmentasi sejarah, khususnya orde baru. Kelompok yang termarginalkan secara historis tersebut, dengan kesadaran sejarah, mencoba mengembalikan posisi politik Islam dengan jalan-jalan non negara dan struktural. Dalam konteks global, adanya marginalisasi politik Islam oleh hegemoni dalam politik internasional (Amerika Serikat) menyebabkan adanya kesadaran untuk mengembalikan daulat politik Islam. Transnasionalisme membawa kesadaran tersebut ke Indonesia dalam bentuk gerakan-gerakan politik Islam. *Kedua*, fenomena ekonomi politik, radikalisme muncul karena akses kapitalisme yang menciptakan mereka yang tidak memiliki akses pada sumber-sumber modal. Dalam bahasa ekonomi politik bahasa ini dikenal dengan pendekatan kelas untuk melawan hegemoni kapital yang oligarkis dengan negara.

Selanjutnya menurut Nur Syam (2009:124) penyebab radikalisme diantaranya yaitu, *pertama* tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya. Hal ini tidak terlepas dari faktor sejarah politik orde baru yang selama masa itu gerakan-gerakan radikalisme selalu di tumpas. Di era reformasi tampaknya tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan. *Kedua* Kegagalan Rezim Sekuler di negara-negara berkembang yang kebanyakan mengadopsi sistem kapitalisme ternyata gagal mengimplementasi kebijakannya ditengah ketidak pastian ekonomi dunia. *Ketiga* Respon Terhadap Barat, isu yang diangkat ke permukaan oleh kelompok radikal adalah apapun yang berasal dari Barat terutama isu tentang salibisme, moralitas *permissiveness*, demokrasi, sekularisasi dan HAM. *Keempat*, Rasionalisasi dan modernisasi dianggap sebagai bagian yang menggerogoti pilar-pilar agama yang disebabkan oleh cara berfikir yang bertolak belakang. Sehingga menawarkan solusi agar kembali kepada agama Islam berdasarkan atas amalan agama kaum *salafish salihin*. *Kelima*, Terpinggirkannya umat Islam di dunia internasional secara politis, *Keenam* serangan kultural (budaya) terhadap masyarakat Islam yang diakibatkan oleh canggihnya di era dunia tanpa Batas (*borderless society*) atau disebut dengan globalisasi. *Ketujuh*, Kegagalan negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dalam mewujudkan kesejahteraan.

Sesungguhnya Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai Ideologi yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan pada dasarnya ideologi negara diartikan sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan asas kerohanian, sumber derivasi dan motivasi, sumber nilai dan dalam sistem kenegaraan menduduki fungsi fundamental negara atau yang disebut sebagai (*staasfundamentalnorm*) dan sebagai perangkat prinsip pengarah (*guiding principles*) yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk di capai dalam rangka melangsungkan kehidupan nasional. (Khaelan, 2015: 32).

Ideologi pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia mengandung arti bagaimana nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia diwujudkan secara konkret tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga tertuang pada alinea ke-IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termaktub dalam tujuan Negara Indonesia. Dengan demikian, mengaktualisasikan Pancasila merupakan sebuah kewajiban bagi bangsa Indonesia.

Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter ke Indonesiaan. Mendasarkan pada perspektif teori fungsionalisme struktural, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*) (Narmoatmojo, 2010: 1).

Syahria Syarbaini (2012: 39) menjelaskan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan berasal dari kata tuhan pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa, berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu dalam zat-Nya dan perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri atas zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat-Nya adalah sempurnna dan perbuatan-Nya tiada dapat disamai oleh siapa pun/apa pun. Tiada yang menyamai Tuhan, Dia Esa. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat di buktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melain-

kan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat di uji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindakan didasarkan pada sesuatu objektivitas, tidak pada subjektivitas.

3. Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini, mencangkup persatuan dalam arti idiologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh Indonesia itu tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan adalah rakyat yang hidup dalam ikatan negara. Dengan adanya sila keempat, berarti bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Demokrasi tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung sekalipun sulit diwujudkan dalam alam modern, namun dalam beberapa hal tertentu dapat dilaksanakan, seperti dalam memilih kepala negara atau sistem referendum.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan memenuhi tuntutan

kehidupan rohani secara seimbang (keadilan material dan spiritual)

Reaktualisasi (membumikan kembali) pancasila dalam makalah ini memiliki tujuan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila sangat mutlak diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Yudi Latif dalam karyanya *Negara Paripurna*, Kuntowijoyo memunculkan gagasan “Radikalisasi Pancasila” dalam arti revolusi gagasan untuk menjadikan Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagi bagaimana semestinya negara dijalankan dengan benar. Latif (dalam Rozak, 2015:31-32), juga menyampaikan rejuvenasi atas Pancasila dengan membumikan Pancasila sebagai pantulan cita-cita dan kehendak bersama, mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, tidak hanya sebatas retorika atau verbalisme di pentas politik.

Reaktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu aktualisasi Pancasila *Subjektif* yaitu realisasi pada setiap individu, dan aktualisasi *Objektif* yaitu realisasi dalam segala aspek kenegaraan dan hukum. Aktualisasi Pancasila *Subjektif* lebih bersifat masif karena pelaksanaan nilai Pancasila diletakkan pada individu masing-masing pada warga negara Indonesia. Sedangkan, aktualisasi *obyektif* adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik, bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta semua bidang kenegaraan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia. Reaktualisasi Pancasila dalam makalah ini dimaknai sebagai reaktualisasi secara subjektif.

Reaktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warganegara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila pada ranah subjektif ini justru lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi aktualisasi Pancasila yang objektif (Notonagoro, 1975:44).

Gagasan mengaktualisasikan pancasila perlu adanya peran pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif melalui sebuah kebijakan dan pengamalan mulai dari pusat sampai ke daerah, Cara yang tepat dalam mereaktualisasi pancasila adalah melalui edukasi dan sosialisasi baik oleh guru, dosen, lembaga swadaya masyarakat, maupun elit politik. Dewasa ini figur negarawan sangat diperlukan dalam rangka membangun bangsa ditengah kemajemukan bangsa Indonesia dan di ditengah peliknya persoalan bangsa, dengan semakin berkembangnya paham-paham radikalisme dan primordialisme baik dari segi agama, ras, suku maupun antar golongan, serta menurunnya rasa nasionalisme pada generasi muda hingga pada persoalan politik pemerintahan yang berjalan dengan masih suburnya praktik-praktik korupsi yang sering

dilakukan oleh elit politik. Sehingga Pancasila tidak hanya indah dalam kata-kata namun baik dalam implementasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak hanya menjadi slogan politik tanpa ada implementasinya. Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya. Tetapi juga akan menjadi solusi dan inspirasi bagi para penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui pemilihan langsung yang demokratis.

Kesimpulan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era perlu disikapi dengan cermat, semakin mudah untuk mengakses berbagai macam informasi sangat memungkinkan menimbulkan intervensi terhadap pola pikir dan ancaman dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi ancaman sebuah bangsa tidak dapat lagi diterjemahkan pada ancaman militer semata, melainkan banyak ancaman yang bersifat non militer dibidang ideologi, politik, ekonomi sosial budaya yang sangat perlu diperhitungkan dan menuntut kepekaan dan kewaspadaan semua pihak.

Faham radikalisme Islam menggunakan berbagai sarana dan media untuk menyebarkan faham mereka, baik dalam rangka pengkaderan internal anggota maupun untuk kepentingan sosialisasi kepada masyarakat. Penyebab munculnya gerakan radikalisme tidak hanya menyangkut isu-isu keagamaan namun memiliki akar permasalahan yang lebih kompleks, yang lebih dominan mengarah pada tekanan politik atas penguasa, dan respon terhadap barat, isu yang diangkat ke permukaan oleh kelompok radikal adalah apapun yang berasal dari Barat terutama isu tentang salibisme, moralitas *permissiveness*, demokrasi, sekularisasi dan HAM. Sehingga reaktualisasi Pancasila (membumikan kembali) pancasila mutlak dilakukan dalam rangka membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi manusia yang pancasilais di tengah tantangan global.

Daftar Pustaka

- BBC Indonesia. (2016). *Anak-anak muda Indonesia makin radikal*. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia. (Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2017)
- Irwan Masduqi. (2012). Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, No 2 Vol 1, 2012, 3

- Kaelan. (2015). *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kompas. 2016. *Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi dan Radikalisme*. <http://nasional.kompas.com/read>. (Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2017)
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia
- Madjid, N. (1995). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Munip, A. (2012). Menangkal Radikalisme di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, pp159-180
- Notonegoro (1975). *Pancasila Secara Utuh Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh
- Retnoningsih, S. D. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya
- Syam, N. (2009). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Syarbini, S. (2012). *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indon.
- Umar, A. R. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, pp 169-186
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. (2015). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Ummah, S. C. (2012). Akar Radikalisme Islam Di Indonesia. *Humanika*, pp 112-124.
- Zarbaliyev (2017). Dialog Budaya, dan Toleransi di Era Globalisasi. *Makalah* disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada